

**EVALUASI KERJASAMA ANTARA BADAN ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN ACEH DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM) TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
LAPAS KLAS IIA PAGAR AIR BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

YENI YUNAS AFRIANI

**MAHASISWI FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
JURUSAN SI ILMU PERPUSTAKAAN
NIM: 531 202 976**



**FAKULTAS ADAB & HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2015-2016**

**EVALUASI KERJASAMA ANTARA BADAN ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN ACEH DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM) TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
LAPAS KLAS IIA PAGAR AIR BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Perpustakaan

Oleh:

**Yeni Yunas Afriani
Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Ilmu Perpustakaan
NIM: 531 202 976**

Diajukan untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Nazaruddin, M.LIS
NIP. 19710110199903 1 002**

Pembimbing II,



**Nurrahmi, M.Pd
NIP. 19790222200312 2 001**

**EVALUASI KERJASAMA ANTARA BADAN ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN ACEH DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA (KEMENKUMHAM) TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN PERPUSTAKAAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
LAPAS KLAS IIA PAGAR AIR BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 25 Februari 2016
16 Jumadil Awal 1437 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



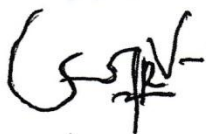
Nazaruddin, M.LIS
NIP. 19710110199903 1 002

Sekretaris,



Nurrahmi, M.Pd
NIP. 19790222200312 2 001

Penguji I,



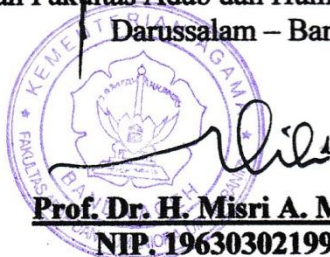
Suraiva, M.Pd
NIP. 19751102200312 2 002

Penguji II,



Nurhayati Ali Hasan, M.LIS
NIP. 19730728199903 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh



Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag
NIP. 19630302199403 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Evaluasi Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.”** skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa Kepada Ayahanda, Ibunda tercinta dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan baik moral maupun spiritual, material serta do’a yang tiada hentinya demi kesuksesan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Bapak Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag dan seluruh jajarannya. Terima kasih juga penulis utujukan kepada Ibu Nurhayati Ali Hasan M.LIS, selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan, dan Ibu Zubaidah, M.Ed selaku Sekretaris jurusan beserta

para stafnya. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Nazaruddin, M.LIS selaku pembimbing I dan Ibu Nurrahmi, M.Pd selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta fikirannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan Kepada Bapak Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, beserta para stafnya, dan Kepala Kemenkumham (Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh) beserta para stafnya, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian guna mendukung penulisan skripsi ini.

Serta tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, yang telah menyemangati, memberikan sumbangan pemikiran, ide-ide kreatif dan saran-saran yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Segala usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam keseluruhan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpustakaan.

Banda Aceh, Juni 2016
Penulis,

Yeni Yunas Afriani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
SURAT PERNYATAAN DAN VALIDASI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerjasama Perpustakaan	12
1. Pengertian Kerjasama Perpustakaan	12
2. Prosedur Kerjasama Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan perpustakaan.....	14
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	22
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22
C. Objek dan Subjek Penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	25
F. Kredibilitas Data Penelitian	27
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh	
a. Sejarah Berdiri	29
b. Visi dan Misi	31
c. Struktur organisasi	33
2. Kemenkumham	34
a. Sejarah Berdirinya.....	34
b. Visi dan Misi	34
c. Struktur organisasi	35
B. Hasil Penelitian	36
a. Realisasi Hasil Kerjasama Pengadaan Serta	

Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan	36
b. Kendala Pengadaan Koleksi Serta	
Pemanfaatan Perpustakaan.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai Evaluasi Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian hukum dan hak asasi manusia, tentang pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh. Kerjasama dilaksanakan atas dasar pemenuhan kebutuhan informasi bagi warga binaan Pemasyarakatan, serta sesuai dengan program dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam memberikan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mempunyai kesempatan untuk datang ke perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi, pencapaian hasil, serta kendala yang dirasakan oleh kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan pada bulan November tahun 2015 di kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan Kemenkumham Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 6 item lingkup kerjasama yang tertera pada dokumen kerjasama, komponen yang terealisasi hanya Pemberian pelatihan kepada petugas pengelola perpustakaan, Perputaran koleksi perpustakaan dan Pemberian bantuan buku-buku koleksi perpustakaan. Kendala yang dihadapi dari pelaksanaan kerjasama ini masih adanya lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki ruangan dan tenaga pengelola perpustakaan, serta jauhnya jangkauan yang harus ditempuh oleh petugas dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam merealisasikan kerjasama, sehingga menambah durasi waktu dalam menyelesaikan pertukaran koleksi, pelatihan, dan mengantar perlengkapan perpustakaan dari kerjasama tersebut.

Kata Kunci: *Kerjasama Perpustakaan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan perpustakaan tidak terlepas dari kebutuhan akan campur tangan dari berbagai pihak guna memenuhi pelayanan terhadap pengguna perpustakaan. Hal yang paling sering dilakukan dalam kelangsungan perpustakaan dalam memenuhi keinginan pengguna adalah kerjasama. Menurut UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan secara detail menjelaskan tentang kerjasama perpustakaan yang isi dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
2. Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.¹

Dalam mekanisme lain kerjasama bermakna sesuatu yang diberikan antara satu perpustakaan dengan perpustakaan lain yang pada umumnya adalah jasa, yang juga dituangkan dalam bentuk kerjasama, karena kerjasama merupakan program dari kelangsungan perpustakaan guna meningkatkan mutu pelayanan terhadap pengguna perpustakaan.

Kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi terdiri atas unsur berikut: koleksi, pengolahan, penyimpanan, pemakai yang bernaung dalam

¹ Tim, *UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, (Jakarta: Perpustnas RI, 2007) hlm, 21.

suatu ruangan atau gedung. Kemudian dalam Perpustakaan terdiri dari unsur Gedung dan Sistem. Pada Pasal I dalam UU No 43 tahun 2007, menjelaskan tentang perpustakaan yang mana perpustakaan adalah: “institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”.²

Dalam kerjasama terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak, keuntungan tersebut guna memenuhi koleksi perpustakaan sehingga dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan yang bekerjasama untuk menjawab tantangan perkembangan zaman secara bersama-sama dan untuk saling membantu. Keuntungan dari kerjasama perpustakaan sebagaimana dipaparkan oleh Prabowo Tjitropranoto adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan koleksi bahan pustaka, dengan cara:
 - a. Silang layan: dilakukan dalam lokasi terbatas.
 - b. Foto copy bahan pustaka: artikel majalah atau bagian dari buku.
2. Tukar menukar katalog, daftar majalah, daftar buku baru, dan sebagainya.
3. Tukar menukar terbitan sekunder, seperti indeks, sari karangan, bibliografi, dan sebagainya.
4. Tukar menukar pengalaman dalam mengelola perpustakaan.
5. Pembinaan keterampilan pustakawan dengan pelatihan atau magang.³

Pada umumnya tidak semua perpustakaan dapat langsung bekerjasama, tanpa didasari landasan hukum dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak. Kerjasama perpustakaan tidak hanya tentang pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan, akan tetapi terdapat berbagai kerjasama lainnya yang bertujuan

² *Ibid*, hlm, 2.

³ Prabowo Tjitropranoto, *Masalah akses informasi*, (Jakarta: Pusat Perpustakaan Pertanian dan Biologi, Departemen Pertanian, 1986), <http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byGroup/institution/dalam%20proses/5620>. hlm, 6.

untuk melayani pengguna perpustakaan. Alasan utama yang mendasari dilakukannya kerjasama antar perpustakaan dalam pemenuhan pelayanan terhadap pengguna menurut buku pedoman pengelolaan perguruan tinggi agama islam adalah: “adanya keterbatasan sumber dana; keterbatasan sumber daya informasi; peningkatan kebutuhan masyarakat akan informasi; perkembangan karya cipta manusia; peningkatan aktivitas pengelola informasi; keterbatasan SDM; keterbatasan akses; dan keterbatasan infrastruktur”.⁴

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didirikan sama dengan berdirinya bangsa Indonesia. Diawali pada tahun 1945, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945 tentang Pembentukan Departemen-Departemen di Republik Indonesia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
- d. perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan

⁴ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, 2012), hlm, 13.

⁵ Muhammad, *Sejarah Kemenkumham*, Skripsi Bab II Unikom, (Jakarta, unikom, 2007) <http://elib.unikom.ac.id>. diakses 2015, hlm, 3.

penghormatan hak asasi manusia; e. pelayanan hukum; f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Berdasarkan hasil temuan dokumen awal penulis di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, penulis menemukan dokumen tentang nota kesepahaman secara resmi antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan yang telah dilaksanakan sejak dari tahun 2010. Kerjasama yang dilakukan bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dan pemberian informasi kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagaimana tertuang dalam dokumen nota kesepahaman tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberian informasi hukum termasuk kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui layanan perpustakaan yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh beserta jajarannya.

Hal yang memperkuat Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman dalam ruang lingkup: “Pemberian pelatihan terhadap petugas pengelola perpustakaan, kerjasama pembangunan database peraturan perundang-undangan, perputaran koleksi perpustakaan, pemberian bantuan buku-buku koleksi perpustakaan, penyimpanan dan

pemeliharaan arsip, menggalakkan kegiatan gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan”.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kelangsungan kerjasama yang telah ada dan mengetahui hasil yang telah dicapai dalam kerjasama tersebut oleh karena itu penulis mengadakan penelitian yang berjudul: **Evaluasi Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realisasi kerjasama yang dilakukan antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.
2. Bagaimana hasil dari kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.

⁶ Kanwil Kemenkumham, Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, *Nota Kesepahaman Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan*. Dokumen awal tanggal, 14 April 2015.

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham dalam melaksanakan Kerjasama tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi kerjasama yang telah dilakukan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pencapaian hasil dari kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham dalam melaksanakan Kerjasama tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

- a. Bagi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh menjadi masukan tentang keberhasilan akan program kerja rutin yang telah terlaksana dalam pengembangan perpustakaan dan kerjasama dengan pihak lain.
 - b. Menjadi referensi bagi pemikiran dan pengetahuan baru untuk penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu perpustakaan dan informasi.
 - c. Bagi pengguna perpustakaan menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran dari kerjasama yang telah terlaksana dalam bidang pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan.
2. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- a. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi bahan untuk pengembangan perpustakaan.
 - b. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melanjutkan kerjasama yang telah dilakukan dalam peningkatan kualitas Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan.
 - c. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat layanan yang baik ketika mengunjungi perpustakaan selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Judul penelitian ini adalah Evaluasi Kerjasama Antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Diharapkan dapat menjelaskan maksud dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga tidak menimbulkan salah paham oleh para pembaca, adapun yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kerjasama Perpustakaan

Menurut KBBI evaluasi adalah “penilaian. sedangkan kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama”.⁷ Sedangkan menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dalam konteks yang sama untuk penulisan skripsi ini evaluasi kerjasama merupakan, “proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk mengevaluasi dan meningkatkan produktivitas”.⁸

Menurut Sulistio Basuki kerjasama perpustakaan adalah kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih.⁹ Kerjasama ini diperlukan karena tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya mampu memenuhi kebutuhan informasi pemakainya.

Dalam skripsi ini evaluasi kerjasama perpustakaan adalah; proses peninjauan hasil dari kesepakatan antara pihak yang bekerjasama, guna melakukan perbaikan di masa yang akan datang, serta mengejar indikator tentang pencapaian hasil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam nota kesepahaman.

⁷ KBBI Online: *Evaluasi dan Kerjasama*. Diambil dari <http://kbbi.web.id/kerja>, Mei 2015.

⁸ Tim: *Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi*, hlm, 17.

⁹ Sulistio Basuki, *Penerepan Teknologi Informasi dan Teknologi Informasi dalam Kerjasama Perpustakaan*, (Jakarta, 2013). <https://sulistiyobasuki.wordpress.com/tag/kerjasama-perpustakaan/>, hlm, 2.

2. Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengembangan merupakan: “proses, cara, perbuatan mengembangkan”.¹⁰ Dengan demikian pendayagunaan menurut KBBI adalah sebagai berikut: “1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; 2. Pengusahaan (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik”.¹¹

Berdasarkan pengertian di atas pengembangan perpustakaan meliputi koleksi, ADM, dan fasilitas serta pendayagunaan perpustakaan meliputi masalah yang harus dipecahkan serta pengembangan literatur. Sehingga pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan serta diusahakan secara bersama-sama untuk mendapatkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan bagi perpustakaan.

Dalam skripsi ini, pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan adalah: realisasi program yang disusun secara bersama dalam hal, pemberian pelatihan terhadap petugas pengelola perpustakaan, kerjasama pembangunan database peraturan perundang-undangan, perputaran koleksi perpustakaan, pemberian bantuan buku-buku koleksi perpustakaan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip, menggalakkan kegiatan gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan.

¹⁰ KBBI Online: *Pengembangan*, Diambil dari <http://kbbi.web.id/kembang>, diakses April 2015.

¹¹ *Ibid*, diakses April 2015.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Pengertian kerjasama perpustakaan artinya kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih.¹ Kerjasama ini diperlukan karena tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri dalam arti koleksinya mampu memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Perpustakaan sebesar *Library of Congress* pun masih mengandalkan pada kerjasama antar perpustakaan untuk memenuhi informasi pemakainya.² Dengan demikian bagi perpustakaan yang lebih kecil koleksinya, kerjasama antar perpustakaan merupakan syarat mutlak untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakainya.

Peran perpustakaan sebagai sumber informasi adalah menyediakan informasi kepada pengguna perpustakaan, baik atas permintaan pengguna atau bahkan tanpa diminta. Perpustakaan sering pula dijadikan tempat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tugas sehari-hari pengguna dan informasi umum lainnya.³ Dengan koleksi yang dimilikinya maka perpustakaan tersebut harus berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pengguna perpustakaan.

¹ Muthia Fariza, Ahmad Fauzie, *Kerjasama Perpustakaan Berbasis SliMS*, (Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah), hlm, 2.

² *Ibid*, hlm, 3.

³ Abdul Rahman Saleh, *Kerjasama Perpustakaan*, Makalah, Dibawakan pada pelatihan Jaringan Kerjasama Akademik di Universitas Soedirman Purwokerto, 10-20 November 1997, hlm, 3.

Salah satu paradoks yang terjadi dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia, adalah soal kerjasama perpustakaan. Seharusnya yang butuh kerjasama perpustakaan adalah dinegara berkembang seperti di Indonesia. Namun hal yang terjadi adalah negara maju yang fokus menerapkan kerjasama antar perpustakaan ini. Alasan yang seringkali disampaikan oleh pemilik perpustakaan. Biasanya mereka beralasan takut koleksinya hilang apabila dipinjamkan, khususnya kalau bahan pustakanya dalam bentuk tercetak. Hal ini terkait budaya rasa kepemilikan yang besar dan tidak percaya dengan orang lain.

Pada dasarnya tidak ada satupun perpustakaan, betapapun besarnya perpustakaan tersebut, yang mampu mengumpulkan semua informasi yang dihasilkan oleh para ilmuwan di seluruh dunia, bahkan untuk disiplin ilmu yang paling spesifik sekalipun. Menyadari hal tersebut maka setiap perpustakaan atau pusat-pusat informasi selalu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan perpustakaan atau pusat-pusat informasi lain yang ada. Ada beberapa faktor yang mendorong kerjasama antar perpustakaan yaitu:

- Adanya peningkatan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan membawa pengaruh semakin banyak buku yang ditulis tentang pengetahuan tersebut.
- Meluasnya kegiatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi mendorong semakin banyaknya dan semakin beraneka ragamnya permintaan pemakai yang dari hari ke hari semakin banyak memerlukan informasi.
- Kemajuan dalam bidang teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap industri dan perdagangan serta perlunya pimpinan serta karyawan

mengembangkan keterampilan dan teknik baru. Keterampilan ini antara lain dapat diperoleh dari membaca.

- Berkembangnya kesempatan dan peluang bagi kerjasama internasional dan lalu lintas internasional; kedua hal tersebut mendorong informasi mutakhir mengenai negara asing.
- Berkembangnya teknologi informasi, terutama dalam bidang komputer dan telekomunikasi, memungkinkan pelaksanaan kerja sama berjalan lebih cepat dan lebih mudah, bahkan lebih murah.
- Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi yang sama. Selama ini merupakan suatu kenyataan bahwa masyarakat pemakai informasi di kota besar memperoleh layanan informasi lebih baik dari pemakai yang tinggal di daerah terpencil.
- Kerjasama memungkinkan penghematan fasilitas, biaya, SDM dan waktu.⁴

B. Kerjasama Perpustakaan

1. Pengertian Kerjasama Perpustakaan

Kerjasama ialah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁵ Menurut Sulistio Basuki kerjasama

⁴ Sulisty-Basuki. Artikel "*Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kerjasama Perpustakaan*" pada <https://sulistyobasuki.wordpress.com/2013/04/14/penerapan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-kerjasama-perpustakaan/#more-191>, diakses tahun 2015, hlm, 3.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), Diambil dari <http://kbbi.web.id/kerjasama>. di Akses April 2015.

perpustakaan artinya kerjasama yang melibatkan dua perpustakaan atau lebih.⁶ Kerjasama perpustakaan dilakukan berdasarkan konsep bahwa kekuatan dan efektivitas kelompok perpustakaan akan lebih besar dibandingkan dengan kekuatan dan efektivitas perpustakaan masing-masing. Prinsip ini dikenal dengan sinergi artinya gabungan beberapa kekuatan akan lebih besar dari pada kekuatan masing-masing. Berdasarkan pengertian tersebut kerjasama perpustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan bersama sumber daya yang dimiliki perpustakaan yang saling bekerjasama.

Kerjasama termasuk poin layanan perpustakaan sebagaimana tertera pada Standar Nasional Perpustakaan Indonesia. Menurut pedoman standar perpustakaan, kerjasama merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan layanan, perpustakaan mengembangkan kerjasama dengan sesama perpustakaan maupun kerjasama pembinaan dengan instansi teknis non-perpustakaan baik di dalam maupun diluar instansi.⁷

Kerjasama dan saling bertukar informasi adalah tindakan yang sudah lama menjadi tradisi dan sifat dasar dari perpustakaan, apalagi dengan adanya dukungan kehadiran teknologi komunikasi, jaringan, internet dan teknologi digital semakin memudahkan dilakukannya kerjasama.⁸ Alasan dilakukannya kerjasama terutama karena perpustakaan tidak mungkin memiliki semua informasi

⁶ Sulistio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1991), hlm, 54.

⁷ Tim Penyusun, *Standar Nasional Perpustakaan*, (Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 2011), hlm, 6.

⁸ Agus Rusmana, *Kerjasama Perpustakaan di Dalam dan Luar Negeri*, Makalah: Disampaikan dalam Kegiatan Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Agama (Bogor: Pajajaran Suites Hotel, 9 Oktober 2013), hlm, 1.

yang dibutuhkan pelanggannya. Informasi yang diinginkan oleh pengguna adalah informasi yang mudah diakses. Informasi seperti ini hanya mungkin diperoleh melalui kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan di sini diwujudkan dalam kerjasama perpustakaan, kolaborasi perpustakaan dan jejaring kerja perpustakaan bertujuan menyediakan data dan informasi bagi pemakai tanpa memandang asal usul data dan informasi tersebut. Kerjasama ini dapat berbentuk formal dan informal. Untuk melaksanakan tujuan tersebut perpustakaan acapkali membentuk jejaring kerja perpustakaan, dalam bahasa Inggris disebut *library networks*.

Secara historis, kerjasama perpustakaan secara informal dimulai oleh ilmuwan melalui komunikasi informal, kerjasama yang hanya mengandalkan komunikasi untuk menjalin suatu kerjasama tanpa ada ikatan tertulis tentang hal-hal yang mengikat suatu kerjasama, dalam proses kerjasama tersebut juga diberi kewenangan yang luas untuk dapat meminjam koleksi pribadinya ke perpustakaan lain serta diberi akses ke koleksi khusus. Kerjasama formal perpustakaan baru ada pada abad 20 dengan tumbuhnya pinjam antar perpustakaan, katalog induk penyimpanan terpusat dan spesialisasi subjek. Kerjasama formal merupakan kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam pemenuhan kebutuhan perpustakaan terhadap pengguna yang biasanya diatur dalam nota kesepahaman bersama secara tertulis dan mempunyai legal hukum yang kuat.

2. Prosedur Kerjasama Pengadaan dan Pemanfaatan Perpustakaan

Konsep kerjasama yang didengungkan di dunia perpustakaan saat ini, tak terkecuali di antara perpustakaan di Indonesia. Istilah pinjam antar perpustakaan,

silang layan, "*resource sharing*" (pemakaian sumber informasi bersama).⁹ yang banyak dipakai orang setelah jaringan informasi teknologi komputer masuk ke dunia perpustakaan, sudah banyak dikenal bahkan diterapkan oleh perpustakaan, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Menyadari hal tersebut maka setiap perpustakaan atau pusat-pusat informasi selalu berusaha untuk menjalin kerjasama dengan perpustakaan atau pusat-pusat informasi lain yang ada. Adapun faktor-faktor yang mendasari kerjasama perpustakaan di lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan membawa pengaruh semakin banyak buku yang ditulis tentang pengetahuan tersebut.
2. Meluasnya kegiatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi mendorong semakin banyaknya dan semakin beraneka ragamnya permintaan pemakai yang dari hari ke hari semakin banyak memerlukan informasi.
3. Kemajuan dalam bidang teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap industri dan perdagangan serta perlunya pimpinan serta karyawan mengembangkan keterampilan dan teknik baru. Keterampilan ini antara lain dapat diperoleh dari mambaca.
4. Berkembangnya kesempatan dan peluang bagi kerjasama internasional dan lalu lintas internasional; kedua hal tersebut mendorong informasi mutakhir mengenai negara asing.
5. Berkembangnya teknologi informasi, terutama dalam bidang komputer dan telekomunikasi, memungkinkan pelaksanaan kerjasama berjalan lebih cepat dan lebih mudah, bahkan lebih murah.
6. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi yang sama. Selama ini merupakan suatu kenyataan bahwa masyarakat pemakai informasi di kota besar memperoleh layanan informasi lebih baik dari pemakai yang tinggal di daerah terpencil.
7. Kerjasama memungkinkan penghematan fasilitas, biaya, SDM dan waktu.¹⁰

Dari pemaparan di atas diharapkan dapat memberikan penjelasan dan keterangan mengenai pentingnya kerjasama di tengah zaman komunikaasi yang

⁹ LA. Ika, *Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang*, Skripsi Pdf. http://eprints.undip.ac.id/22045/4/BAB_I,_II,_III.pdf. Online - 2010, diakses April 2010, hlm, 1.

¹⁰ Abdul Rahman Saleh, *Kerjasama Perpustakaan*, hlm, 3.

semakin modern. Perpustakaan dituntut untuk menyediakan informasi secara *update* dan teraktual bagi pengguna perpustakaan yang membutuhkan informasi, dengan demikian kebutuhan akan pemenuhan informasi tersebut menuntut perpustakaan untuk berbenah dan melakukan kerjasama.

a. Syarat-Syarat Kerjasama Perpustakaan

Dalam mengadakan kerjasama ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh masing-masing anggota perpustakaan, agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Kesadaran, kesediaan dan tanggungjawab untuk memberi maupun menerima permintaan serta mentaati setiap peraturan, mekanisme maupun harga yang dibuat bersama, yang dituangkan baik dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan.
2. Memiliki koleksi pustaka yang terorganisir dengan baik dan siap pakai
3. Memiliki katalog perpustakaan atau daftar koleksi perpustakaan.
4. Memiliki penanggungjawab dan tenaga yang dapat membimbing pengguna dalam mendaya gunakan pustaka secara bersama.¹¹

Dari keseluruhan syarat yang sudah disebutkan di atas, nantinya di tuangkan dalam nota kesepahaman yang disusun bersama, dalam nota kesepahaman tersebut menjelaskan tentang butir-butir dari kerjasama yang akan dijalin oleh kedua institusi yang mempunyai ketentuan hukum yang jelas guna menghindari perselisihan di kemudian. Nota kesepahaman tersebut di buat rangkap dua yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai secukupnya.

Selain itu ada beberapa faktor penting yang perlu di perhatikan dalam menuangkan kesepakatan baik tertulis maupun lisan antara lain:

¹¹ Arlinah, *Manajemen Kerjasama Antar Perpustakaan*, diambil dari <http://faculty.petra.ac.id/arlinah/perpustakaan/kerjasama/kerjasama.pdf>. Diakses Juni 2015. hlm, 2.

1. Alasan dan tujuan kerjasama;
2. Ruang lingkup kerjasama;
3. Siapa saja yang ikut terjaring;
4. Kapan kerjasama mulai dilaksanakan dan diakhiri;
5. Bagaimana hubungan antar anggota yang ikut dalam kerjasama;
6. Bagaimana pembagian kerjanya supaya tidak terjadi duplikasi, bagaimana pembiayaannya;
7. Kemungkinan penggunaan teknologi canggih.¹²

Faktor-faktor tersebut merupakan item penyusunan draf nota kesepahaman bersama yang nantinya akan di tanda tangani oleh pimpinan lembaga guna mengikat kerjasama dengan lembaga lain. Nota kesepahaman tersebut disusun oleh kedua belah pihak, yang kemudian disepakati secara bersama dengan mempertimbangkan segala aspek dan landasan hukum guna menghindari konflik antar lembaga dikemudian hari.

b. Kerjasama Bidang Pengadaan Perpustakaan

Dalam bentuk ini berbagai perpustakaan bekerja sama dalam pengadaan buku. Ini merupakan awal bentuk kerjasama. Masing-masing perpustakaan bertanggung jawab atas kebutuhan informasi pemakainya. Maka perpustakaan akan memilih buku berdasarkan permintaan anggotanya atau berdasarkan dugaan pengetahuan pustakawan atas keperluan bacaan anggotanya.

Dorongan kerjasama ini berasal dari bertambah banyaknya buku yang diterbitkan dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, perluasan jenis terbitan mulai dari buku dan majalah hingga ke laporan tak diterbitkan, kesemuanya berfungsi sebagai sumber informasi, hubungan yang makin kompleks antara

¹² Purwono, *Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm, 3.4.

berbagai subjek dan keterbatasan dana perpustakaan.¹³ Hanya dengan pengadaan gabungan atau pengadaan terkoordinasi maka perpustakaan mampu mengakses semua bahan pustaka yang mungkin perlu dibeli dan menjamin bahwa semua sumber telah dilacak. Di Indonesia perlunya kerjasama ini masih amat dirasakan karena sulitnya impor buku.

Berbagai importir yang ada lazimnya enggan mengimpor buku dalam jumlah terbatas baik mengenai judul maupun kuantitasnya. Di segi lain perpustakaan berusaha membeli buku dalam kuantitas terbatas namun dengan jumlah judul lebih banyak. Hal ini dapat diatasi bila perpustakaan bekerja sama dalam hal pengadaan.

Pada bentuk kerjasama pengadaan, sering kali terjadi keributan mengenai ruang simpan yang terbatas serta ketidakjelasan batas subjek dan keterkaitan satu subjek dengan subjek lain serta penyebaran berbagai perpustakaan dalam kawasan yang luas. Maka pendekatan yang digunakan ialah menunjuk perpustakaan penyimpanan yang melayani kelompok perpustakaan peserta. Pada pendekatan ini, sebuah perpustakaan ditunjuk untuk menyimpan buku yang kurang digunakan milik perpustakaan lain.

Biasanya bentuk kerjasama ini diikuti dengan pengadaan bersama. Perpustakaan pusat penyimpanan dapat mengurangi masalah ruang yang dihadapi perpustakaan anggota. Perpustakaan pusat penyimpanan ini menyimpan jenis buku sebagai berikut : (a) buku hadiah; (b) deposit tetap yang menjadi milik

¹³ Muhammad Ali Akbar, *Kerjasama Perpustakaan: Lembaga Pendidikan*, <http://akbarlibrary.blogspot.co.id/2014/12/kerjasama-perpustakaan-lembaga.html>, (Jurusan: Ilmu Perpustakaan & Informasi Fakultas: Adab & Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2014), diakses 2015, hlm, 4.

perpustakaan deposit; (c) buku disimpan berdasarkan deposit per subjek. Misalnya perpustakaan yang ditunjuk oleh badan induknya untuk menyimpan semua karya staf badan induk dan (d) penyimpanan atas dasar sewa.¹⁴ Umumnya koleksi yang disimpan berdasarkan kriteria a dan b.

Tujuan kerjasama pengadaan adalah meningkatkan dan memperluas sumber koleksi yang telah ada dengan biaya sekecil mungkin. Tujuan ini tersirat dalam kerjasama pengadaan dan penyimpanan. Dalam hal spesialisasi subjek, alasan penyimpanan koleksi untuk membentuk koleksi yang komprehensif serta sekaligus menghindari penyiangan saluran (*copy*) terakhir membutuhkan integrasi dengan cara pertukaran bahan pustaka. Cara pertukaran maupun redistribusi dapat digunakan sebagai cara untuk menambah koleksi perpustakaan dengan 2 cara. Cara pertama ialah pertukaran publikasi badan induk dengan badan lain yang bergerak dalam bidang yang sama tanpa perlu membeli dan juga untuk memperoleh publikasi yang tidak dijual untuk umum atau untuk memperoleh bahan pustaka yang sulit dilacak atau sulit dibeli melalui toko buku. Yang paling akhir disebut ini terutama terjadi dengan karya yang sangat khusus dan buku terbitan luar negeri.

Pertukaran dengan pihak luar negeri dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perpustakaan nasional. Pertukaran biasanya dilakukan berdasarkan prinsip satu lawan satu, artinya satu terbitan ditukar dengan terbitan lain dengan tidak memandang tebal tipisnya terbitan. Pertukaran terbitan banyak dilakukan dengan perpustakaan dari negara berkembang atau negara blok sosialis;

¹⁴ *Ibid*, hlm, 5.

umumnya buku terbitan kedua kawasan itu sulit diperoleh di pasaran terbuka. Cara kedua perpustakaan dapat menambah koleksinya ialah dengan cara menukar atau mendistribusi kembali buku-buku yang sudah tidak dicetak lagi atau buku yang tidak lagi diperlukan oleh perpustakaan lain. Cara tersebut membantu memecahkan masalah penyiangan buku dan penyimpanan buku yang dihadapi banyak perpustakaan. Hanya saja mungkin ada peraturan yang melarang penyiangan buku maupun pertukaran terbitan dengan lembaga lain. Terbitan seperti *Unesco journal on information science, librarianship and archives studies* biasanya memuat daftar terbitan yang dapat ditukarkan bahkan juga senarai terbitan yang dapat diminta secara cuma-cuma.

c. Kerjasama Bidang Pemanfaatan Perpustakaan

Jaringan perpustakaan nasional harus didisain dalam kaitannya dengan perpustakaan nasional, regional, penelitian dan khusus serta juga perpustakaan sekolah, akademi dan universitas. Kebijakan yang jelas harus dirumuskan, menetapkan sasaran, prioritas dan jasa dalam kaitannya dengan kebutuhan komunitas lokal. Perpustakaan umum hendaknya di organisasikan secara efektif dan standar operasi professional harus dipertahankan.¹⁵

Latar belakang dari kerjasama Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala Pelaksanaan dan Teknologi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, merupakan bagian didalam tupoksi pelayanan Badan Arsip dan Perpustakaan, dimana terdapat dua jenis layanan, layanan diluar dan layanan di dalam. Layanan

¹⁵Sulistyo-Basuki, *Konsep Pengembangan Perpustakaan Umum Menuju Perpustakaan Digital*, Artikel pdf, <https://sulistiobasuki.wordpress.com> (Jakarta, 2015), hlm, 13.

di luar menggunakan mobil keliling dan mobil keliling itu memberikan layanan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan.

Hal yang diharapkan bisa memenuhi pemanfaatan perpustakaan sebagaimana di paparkan dalam kerjasama perpustakaan meliputi:

- Penyediaan fasilitas ini umumnya dibatasi pada penggunaan ruang baca, koleksi rujukan, fasilitas fotocopi dan koleksi lain yang terbuka untuk umum.
- Koleksi yang boleh dipinjam, tetapi anggotanya dari perpustakaan lain hanya boleh membaca atau membuat catatan, dia tidak boleh meminjam.
- Diberbagai Negara maju siapa saja boleh masuk ke perpustakaan umum, membaca, menelusur, menggunakan fasilitas fotocopi (asal bayar) tanpa perlu menunjukkan tanda pengenalan
- Hal ini didorong adanya manifesto perpustakaan umum yang dikeluarkan Unesco pada tahun 1972, dalam manifesto tersebut dinyatakan bahwa perpustakaan umum terbuka bagi siapa saja tanpa memandang perbedaan warna kulit, jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama dan kepercayaan
- Dasar manifesto tersebut pada prinsipnya setiap orang berhak memasuki perpustakaan umum.¹⁶

¹⁶Sholihin, *MODUL 2 Bentuk-bentuk kerjasama Perpustakaan*, www.sholihin.staff.uns.ac.id/bentuk-kerjasama-perpustakaan.htm, 6.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif yaitu “suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.¹ Jenis penelitian deskriptif yang digunakan adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu “proses penelitian dengan terjadinya secara alamiah apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, serta menekankan deskripsi secara alami. Dengan pendekatan secara langsung penulis tidak mencari generalisasi atas hasil yang dicapai tetapi menelusuri secara mendalam”.²

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Lamnyong Banda Aceh dan Kantor Kemenkumham dengan fokus penelitian di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh, Alasan penulis

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2005), hlm, 54.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), hlm, 13.

memilih lokasi tersebut yang mana karena merupakan instansi yang memberikan layanan kepada publik dan terletak di kota Banda Aceh yang membantu penulis dalam menghemat biaya, waktu, dan proses dalam melakukan penelitian ini,.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.³ Menurut Supranto objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.⁴ Adapun objek penelitian dalam penulisan karyatulis ini meliputi: 1. Realisasi Kerjasama, 2. Hasil dari kerjasama, 3. Kendala yang di hadapi.

2. Subjek penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, benda atau tempat yang di amati sebagai sasaran.⁵ Adapun subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan Kemenkumham dengan merujuk kepada dokumen kerjasama dan fokus dari penelitian ini adalah Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989, hlm, 622.

⁴ Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survei dan Eksperimen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 21.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989, hlm, 862.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang mana penulis mewawancarai informan yaitu kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan pola terstruktur yaitu penulis sudah mengetahui pasti akan jawaban informasi apa yang akan diperoleh, dengan pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis ketika hendak melakukan penelitian ini.⁷ Wawancara dilakukan pada saat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pendapat dan perasaan kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dalam penerapan kerjasama dengan lembaga lain.

Pedoman wawancara juga digunakan penulis untuk mengingatkan narasumber mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian direkam dengan aplikasi *handphone* dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm, 317.

⁷ *Ibid*, hlm, 321.

secara manual. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.⁸

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.⁹ Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila di dukung oleh lampiran dokumen mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang mendukung keabsahan penelitian ini adalah dokumentasi kerjasama perpustakaan antara Badan Arsip dan perpustakaan dengan Kemenkumham, data realisasi kerjasama, jumlah koleksi perpustakaan, jadwal pelaksanaan pelatihan,

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data model Miles dan Huberman meliputi data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *Conclusion / Verification*. Menurut Miles and Huberman dalam buku Sugiyono, mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁰

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm, 238.

⁹ *Ibid*, hlm, 238.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. hlm, 336.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi.¹¹ Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹²

3. *Conclusion / Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.¹³ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

¹¹ *Ibid*, hlm, 339.

¹² *Ibid*, hlm, 341.

¹³ *Ibid*, hlm, 345.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Kredibilitas Data Penelitian

Kredibilitas data dalam penelitian terdiri dari:

1. Perpanjangan pengamatan
2. Peningkatan ketekunan dalam penelitian
3. Triangulasi,
4. Diskusi dengan teman sejawat
5. Analisis kasus negatif
6. *Member Check*.¹⁴

Dalam penelitian ini pengujian Kredibilitas data dilakukan dengan cara *Member check*. *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *Member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Pelaksanaan *Member Check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara individual, dengan cara penulis datang ke pemberi data, atau melalui forum diskusi kelompok. Setelah data disepakati bersama, maka

¹⁴ *Ibid*, hlm 368.

para pemberi data diminta untuk menandatangani, supaya lebih otentik. Selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan *member check*.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm 375.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

a. Sejarah Berdirinya

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh pertama didirikan pada tahun 1969 dengan nama Perpustakaan Negara yang berlokasi pada salah satu ruangan seluas 12 m² di Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, dengan jumlah koleksi saat itu sebanyak 80 eksemplar dan 2 orang pegawai yang ditempatkan disana. Dari semenjak berdiri sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan nama menyesuaikan dengan peraturan dan bertujuan untuk mudah diingat oleh masyarakat.

Perubahan nama pertama kali terjadi pada tahun 1979 berdasarkan SK (Surat Keputusan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.8429/c/B.3/1979, perpustakaan tersebut berubah nama Perpustakaan Wilayah. Serta Pada tahun 1989, terbitlah Keppres (Keputusan Presiden) No. 11/1989 yang mengatur bahwa Perpustakaan Wilayah berubah nama menjadi Perpustakaan Daerah. Setelah itu beberapa tahun kemudian dengan terbitnya Keppres No. 50/1997 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional RI, berdampak pula pada perubahan nama dari Perpustakaan Daerah menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian dengan terbitnya Perda (Peraturan Daerah) No. 39 Tahun 2001, Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa

Aceh telah menjadi salah satu lembaga daerah dengan nama Badan Perpustakaan Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam).

Terakhir UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Qanun No. 5/2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, maka Badan Perpustakaan Provinsi Aceh digabung dengan Badan Arsip Provinsi Aceh sehingga namanya menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.

Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh setiap tahunnya menambah koleksi buku, rak buku, meja dan kursi baca, serta pemeliharaan jaringan LAN serta mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah maupun NGO seperti Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Nasional Australia, Persatuan Pustakawan Malaysia, World Vision, Goethe Institute, UNESCO, Kota Augsburg Jerman, dan lain-lain.¹ Selain kerjasama dengan pihak-pihak yang telah disebutkan diatas Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh juga menjalin kerjasama dalam hal pembinaan, pemanfaatan koleksi, manajemen, pelatihan, dan lain sebagainya, dengan berbagai pihak, baik sekolah, pesantren, kampus, akademi serta lembaga lembaga swasta maupun negeri yang salah satunya adalah kerjasama dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Aceh dalam hal Pengembangan dan Pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dan Kemenkumham dimulai pada tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Bapak Drs. H. Ace Hendarmin, Bc.IP dari Kemenkumham

¹ Dokumen Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. *Profil Lembaga*. arpus.acehprov.go.id. Diakses November 2015, hlm, 1.

yang disebut sebagai pihak pertama dan Drs. H. Nurdin M. Jusuf Dewantara, MM dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yang disebut sebagai pihak kedua.²

b. Visi dan Misi Badan Arsip dan Perpustakaan

Adapun yang menjadi visi dan misi dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yaitu sebagai berikut:

Visi

Arsip dan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembangunan SDM yang Islami.

Misi

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti akuntabilitas kinerja pemerintah Aceh.
2. Meningkatkan pelayanan dan sarana kearsipan dan perpustakaan
3. Menggali, menyelamatkan, melestarikan dan memanfaatkan khasanah budaya aceh dan nilai-nilai Dinul Islam.
4. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatus kearsipan dan perpustakaan.
5. Membina dan mengembangkan minat dan budaya baca.
6. Masyarakat meningkatkan peran perpustakaan sebagai sarana dan pembangunan SDM.
7. Membina kerja sama kearsipan dan perpustakaan didalam dan luar negeri.

² Dokumen Nota Kesepahaman antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumam.

c. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh berdasarkan dokumen yang penulis dapatkan pada saat melaksanakan penelitian merupakan keadaan tahun 2013, yang mana struktur baku sesuai dengan tahun penelitian belum bisa di permanenkan karena terus berubah-ubah. Serta kepengurusan yang terlampir tersebut merupakan pihak yang mengikuti proses kerjasama dengan Kemenkumham.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
Keadaan tahun 2013.³

³ Dokumen pada Saat lanjutan wawancara dilaksanakan tanggal 24 November 2015.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Sejarah Berdirinya

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia didirikan sama dengan berdirinya bangsa Indonesia. Diawali pada tahun 1945, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945 tentang Pembentukan Departemen-Departemen di Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah dibentuk berdasarkan keputusan menteri kehakiman No. M06.PR.07.02 tahun 1982.⁴

b. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi dan misi dari Kemenkumham adalah sebagai berikut:

Visi :

"Mewujudkan Masyarakat Aceh yang Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia"

Misi :

1. Melaksanakan pembentukan hukum
2. Melaksanakan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Melaksanakan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia

⁴ Agung Pambudi Kurniawan, *Sejarah Kementerian Hukum dan HAM RI (Inspektorat Jenderal)*, diakses pada, <http://tugas19.blogspot.co.id/2012/07/sejarah-kementerian-hukum-dan-ham-ri.html>, Desember 2015, hlm, 1.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia masyarakat.

c. Struktur Organisasi

Gambar: 4.2. Bagan Susunan Organisasi
Kantor Wilayah Kemenkumham RI.⁵

⁵ Dokumen Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Aceh.

B. Hasil Penelitian

1. Realisasi Hasil Kerjasama Pengadaan serta Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pelaksanaan dan Teknologi Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, kerjasama yang terealisasi adalah bidang pengadaan koleksi serta pemanfaatan perpustakaan.⁶ Pihak Kemenkumham yaitu Lapas Klas IIA Pagar Air menyediakan fasilitas berupa gedung atau ruangan sebagai tempat untuk lokasi bagi suatu perpustakaan, sedangkan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh menyediakan/mengadakan koleksi di perpustakaan. Metode pengadaan yang digunakan adalah dengan cara menitipkan koleksi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh dan pada Lembaga Pemasyarakatan lainnya selama 3 bulan. Setelah masa tersebut koleksi yang ada akan di *rolling* (tukar) dari satu lembaga pemasyarakatan dengan yang lain. Hal ini dilakukan agar warga binaan tidak bosan dengan koleksi yang ada. Sekarang metode pengadaan penitipan sudah meningkat menjadi pengadaan koleksi permanen di lembaga pemasyarakatan seluruh Aceh. Hal ini merupakan keberhasilan dari pelaksanaan perjanjian bersama sebagai mana tertuang dalam nota kesepahaman bersama. Dengan demikian langkah awal dari kerjasama ini adalah pengadaan perpustakaan (ruangan), setelah pembekalan terhadap sumberdaya manusia kemudian dilanjutkan ke tahap pengadaan koleksi secara bertahap dan mulai direalisasikan pada tahun 2013.

⁶ Dokumen pada Saat lanjutan wawancara dilaksanakan tanggal 24 November 2015

Data lokasi dan jumlah koleksi yang dititipkan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh pada tahun 2013 dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.1: Pos Pelayanan Perpustakaan Titipan Pada Semua Lapas di Aceh

No	Pos Titipan	Jlh Buku Yang Ada Pada Perpustakaan LAPAS	Keterangan
1	Lapas Klas IIA Pagar Air	1.585 jdl/4.433 eks	Bantuan Tahun 2013
2	Lapas Klas II B Kajhu	1572 jdl/ 4.571 eks	Bantuan Tahun 2013
3	Rutan Klas IIB Jantho	1522 jdl/ 4295 eks	Bantuan Tahun 2013
4	Rutan Klas II B Sigli	1543 jdl/ 4.419 eks	Bantuan Tahun 2013
5	Cabrutan Kuta Bakti Pidie	1572 jdl/ 4442 eks	Bantuan Tahun 2013
6	Cabrutan Bireun	1637 jdl/ 4578 eks	Bantuan Tahun 2013
7	Lapas Klas II A Lhokseumawe	1584 jdl/ 4369 eks	Bantuan Tahun 2013
8	Cabrutan Lhoksukon	1572 jdl/ 4447 eks	Bantuan Tahun 2013
9	Cabrutan Idi	1592 jdl/4569 eks	Bantuan Tahun 2013
10	Lapas Klas IIB Langsa	1458 jdl/ 4091 eks	Bantuan Tahun 2013
11	Lapas Klas IIB Kuala Simpang	1602 jdl/4570 eks	Bantuan Tahun 2013
12	Rutan klas IIB Takengon	1618 jdl/ 4466 eks	Bantuan Tahun 2013
13	Cabrutan Blangkejeren	1579 jdl/ 4599 eks	Bantuan Tahun 2013
14	Lapas Klas IIB Kutacane	1582 jdl/ 4461 eks	Bantuan Tahun 2013
15	Cabrutan Klas IIB Lhoknga	1549 jdl/4521 eks	Bantuan Tahun 2013
16	Cabrutan Calang	1528 jdl/ 4298 eks	Bantuan Tahun 2013
17	Lapas Klas IIB Meulaboh	1523 jdl/ 4705 eks	Bantuan Tahun 2013
18	Rutan Klas IIB Tapaktuan	1581 jdl/4601 eks	Bantuan Tahun 2013
19	Cabang Rutan Sigli	1471 jdl/ 4454 eks	Bantuan Tahun 2013
20	Lapas Sinabang	1591 jdl/ 4565 eks	Bantuan Tahun 2013
21	Rutan Klas IIB Sabang	1534 jdl/ 4717 eks	Bantuan Tahun 2013
22	Lapas Klas III Blang Pidie	560 jdl/ 1013 eks	-

Sumber: Dokumen Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham.

Jumlah koleksi yang dititipkan berjumlah, 1.585 judul/4.433 eks. Koleksi yang diutamakan bagi lembaga pemasyarakatan Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh ini terdiri dari keterampilan seperti, pertanian dan pertukangan, koleksi agama dan pengembangan diri. Para narapidana diharapkan dapat memanfaatkan koleksi ini dan setelah keluar dari lapas ini mempunyai keterampilan dan pengetahuan agama yang kuat.

Berdasarkan amatan peneliti pada saat berkunjung ke lembaga pemasyarakatan tersebut manajemen pengelolaan perpustakaanpun sudah mulai berjalan dengan baik. Koleksi yang ada di lapas mulai bertambah bukan lagi dari koleksi titipan dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, tetapi dari dana yang sudah dianggarkan untuk pembelian buku koleksi perpustakaan setiap tahunnya. Jumlah koleksi pada tahun 2013 hanya $\pm$ 4000 sekarang sudah mencapai angka 7378 eksemplar dan 2300 judul.⁷

Nota kesepahaman mencakupi seluruh bagian dalam pengelolaan perpustakaan secara professional, dan pelatihan yang dilaksanakan selama 1 bulan tersebut dengan materi tentang Pelatihan Manajemen dan Pengolahan Bahan Pustaka telah memberikan dampak positif bagi perpustakaan. Perpustakaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah mandiri dan tidak bergantung lagi pada Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. Peserta dari kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁷ Dokumen daftar koleksi Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh

Tabel 4.2: Peserta Bimtek Pengelola Perpustakaan**Lapas/ Rutan Se-Aceh tahun 2014**

No	Nama	Instansi Asal	Kabupaten/kota
1	Merni Salvita, SH	Lapas Klas IIA Banda Aceh (Pagar Air)	Banda Aceh
2	Putri Selida Ambreini,	Lapas Klas IIA Banda Aceh (Pagar Air)	Banda Aceh
3	Mutia Delima, IBR. S. Sos.I	Rutan Klas IIB Banda Aceh (Kajhu)	Banda Aceh
4	Sri Suryani, A.Md, SH	Rutan Klas IIB Banda Aceh (Kajhu)	Banda Aceh
5	Yusria Nasution,	Cabang Rutan Lhoknga	Aceh Besar
6	Ibnu Abbas	Cabang Rutan Lhoknga	Aceh Besar
7	Bhima. S.Hrp	Rutan Klas IIB Jantho	Aceh Besar
8	Juzli	Rutan Klas IIB Jantho	Aceh Besar
9	Azasdin, SH	Rutan Klas IIB Sigli	Pidie
10	Syukri, Sm HK	Rutan Klas IIB Sigli	Pidie
11	Azizah	Cabang Rutan Kota Bakti	Pidie
12	Ruhama	Cabang Rutan Kota Bakti	Pidie
13	Asnati	Cabang Rutan Bireun	Bireun
14	Anggela Delena Puspitasari, SH	Cabang Rutan Bireun	Bireun
15	Nuraini	Lapas Klas IIA Lhokseumawe	Lhokseumawe
16	Marinda Andayani	Lapas Klas IIA Lhokseumawe	Lhokseumawe
17	Idris, SH	Cabang Rutan Lhoksukon	Aceh Utara
18	Mursidin	Cabang Rutan Lhoksukon	Aceh Utara
19	Nizarli	Cabang Rutan Idi	Aceh Timur
20	Hermawan, SH	Cabang Rutan Idi	Aceh Timur
21	Isna Widianti	Lapas Klas IIB Langsa	Langsa
22	Ruli Maradona Nasution	Lapas Klas IIB Langsa	Langsa
23	Miswan	Lapas Klas II B Kuala Simpang	Aceh Tamiang
24	Zulfadli	Lapas Klas II B Kuala Simpang	Aceh Tamiang
25	Rian Afriandi Putra	Rutan Klas IIB Takengon	Ace Tengah
26	Mustiwal Rahmad	Rutan Klas IIB Takengon	Ace Tengah
27	Mayuddin	Cabang Rutan Blangkejeren	Gayo Lues
28	Sahedun, SH	Lapas Klas IIB Kutacane	Aceh Tenggara
29	Juanda Efendi	Lapas Klas IIB Kutacane	Aceh Tenggara
30	Noviatul Muslimah	Cabang Rutan Calang	Aceh Jaya
31	Eka Nurisa	Cabang Rutan Calang	Aceh Jaya
32	Mastuti Aidar	Lapas Klas IIB Meulaboh	Aceh Barat

33	Safrizal	Lapas Klas IIB Meulaboh	Aceh Barat
34	Suryadi Sastra	Rutan Klas IIB Tapaktuan	Aceh Selatan
35	Ade Adriman	Rutan Klas IIB Tapaktuan	Aceh Selatan
36	Jaaruddin, Hrp, SH	Cabang Rutan Singkil	Aceh Singkil
37	Saiful Gunawan	Cabang Rutan Singkil	Aceh Singkil
38	Suparman, SH	Cabang Rutan Sinabang	Simeulu
39	Hardi Ali	Cabang Rutan Sinabang	Simeulu
40	Aiyub Samiza	Rutan Klas IIB Sabang	Sabang
41	Rachmat Hidayat	Rutan Klas IIB Sabang	Sabang

Dari enam ruang lingkup/ bentuk kerjasama yang ada dalam dokumen nota kesepahaman antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham (Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh), hanya tiga bentuk kerjasama yang terealisasi. kegiatan tersebut, yaitu:

- a. Pemberian pelatihan kepada petugas pengelola perpustakaan
- b. Perputaran koleksi perpustakaan
- c. Pemberian bantuan buku-buku koleksi perpustakaan

Sedangkan pembangunan database peraturan perundang-undangan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip belum terealisasi masih terkendala dengan bahan yang dibutuhkan tidak berada di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pagar Air Banda Aceh, tetapi berada di kantor pusat Kemenkumham yang berada di Banda Aceh.

2. Kendala Kerjasama Pengadaan & Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan

Kendala yang dihadapi dalam kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh) berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Lembaga pemasyarakatan memiliki keterbatasan ruangan dan tenaga pengelola perpustakaan.
- b. Tidak adanya tenaga dengan latar belakang pendidikan atau yang sudah mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan perpustakaan.
- c. Banyaknya berkas atau dokumen yang tidak berada di lapas sehingga untuk penyimpanan arsip dan pembuatan database belum terlaksana.⁸

Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh) dalam menjalin kerjasama berdasarkan hasil wawancara penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kecilnya ruangan untuk perpustakaan,
- a. Minimnya tenaga dari lembaga pemasyarakatan untuk mengelola perpustakaan karena kebanyakan tenaga di lapas digunakan untuk menjaga para penghuni yang ada di sana.
- b. Butuh waktu yang lama guna membuat suatu perpustakaan di lembaga pemasyarakatan tersebut.
- c. Belum tersedianya koleksi, mobiler, dan tenaga yang memahami tentang manajemen pengelolaan perpustakaan.⁹

Sebagaimana maksud dan tujuan dari kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman kerjasama kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

- 1) Nota kesepahaman ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana

⁸ *Ibid*, hlm, 7.

⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala bidang pelaksanaan dan teknologi Desember 2015.

pembelajaran dan pemberian informasi kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

- 2) Pelaksanaan Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemberian informasi hukum kepada masyarakat termasuk kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui layanan perpustakaan yang pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya.¹⁰

Dari sedemikian banyak kendala kerjasama pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham yang dihadapi terus di evaluasi guna menumbuh kembangkan perpustakaan di lingkungan Kemenkumham (Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh). Kerjasama pemanfaatan dan pengembangan perpustakaan yang di tanda tangani pada hari senin tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu sepuluh tersebut sudah dapat dilihat hasil yang signifikan, dari tidak adanya perpustakaan menjadi tersedianya fasilitas perpustakaan bagi para narapidana.

¹⁰ Dokumen Kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Aceh dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Aceh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi Kerjasama yang dilakukan antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh, meliputi, Pemberian pelatihan kepada petugas pengelola perpustakaan, Perputaran koleksi perpustakaan, Pemberian bantuan buku-buku koleksi perpustakaan.
2. Hasil yang dicapai setelah pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dan pengembangan koleksi antara Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham di Lapas Klas IIA Pagar Air Banda Aceh ini sangat baik dan perlu ditingkatkan. Dari semula kekurangan koleksi, SDM pengelola, dan sangat bermanfaat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, sekarang sudah adanya perpustakaan di lembaga pemasayarakatan, guna melayani para narapidana dalam mencari informasi dan pengetahuan.
3. Kendala yang dihadapi oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan Kemenkumham dalam merealisasikan kerjasama ini adalah:

keterbatasan ruangan dan kurangnya tenaga sebagai pengelola perpustakaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis perlu menyarankan beberapa hal kepada pihak-pihak berkepentingan sebagai berikut:

1. Realisasi Hasil Kerjasama Pengadaan serta Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan yang tertuang dalam nota kesepahaman bersama, dari 3 program yang telah terlaksana berdasarkan butir-butir MOU yang telah disepakati harus terus direalisasikan oleh pihak lapas (Kemenkumham).
2. Hasil kerjasama yang sudah terealisasi harus lebih ditingkatkan baik di bidang pelayanan maupun pengelolaan perpustakaan, sehingga butir-butir kerjasama yang belum terealisasi sebagaimana tertuang dalam dokumen kerjasama, untuk kedepan tidak lagi dimasukkan kedalam dokumen naskah kerjasama.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemikiran dan pengetahuan baru untuk penelitian selanjutnya tentang pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- , Dokumen Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh. *Profil Lembaga*, diambil dari arpus.acehprov.go.id diakses November 2015.
- , Sejarah Singkat Kemenkumham, Skripsi. http://sejarah.singkat.kemenkumham.ac.id/cari_bahan.pdf. diakses Desember 2015.
- Abdul Rahman Saleh, *Kerjasama Perpustakaan*, Makalah, Dibawakan pada Pelatihan Jaringan Kerjasama Akademik di Universitas Soedirman Purwokerto, 10-20 November 1997. Di Akses Juni 2015.
- Agung Pambudi Kurniawan, *Sejarah Kementerian Hukum dan HAM RI (Inspektorat Jenderal)*, diakses pada, <http://tugas19.blogspot.co.id/2012/07/sejarah-kementerian-hukum-dan-ham-ri.html>, Desember 2015.
- Agus Rusmana, *Kerjasama Perpustakaan di Dalam dan Luar Negeri*, Makalah: Disampaikan dalam Kegiatan Koordinasi Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Agama (Bogor: Pajajaran Suites Hotel, 9 Oktober 2013) Di Akses Juni 2015.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, 2012.
- Ditjen PP Kemenkumham, *Perkembangan Harmonisasi RUU Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007*. Diambil dari: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-ruu-tahun-2010/40-harmonisasi-ruu/2086-rpp-tentang-pelaksanaan-uu-no43-2007-tentang-perpustakaan.html>. diakses Juni 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diambil dari: <http://kbbi.web.id/> (April 2015)
- LA Ika, 2010. *Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang*, Diambil dari: http://eprints.undip.ac.id/22045/4/BAB_I,_II,_III.pdf. Diakses (April 2015).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Muthia Fariza, Ahmad Fauzie, *Kerjasama Perpustakaan Berbasis SliMS*, Pdf (Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah).
- Muhammad, *Sejarah Kemenkumham*, Skripsi Bab II Unikom, (Jakarta, unikom, 2007) <http://elib.unikom.ac.id>. diakses 2015.
- Muhammad Ali Akbar, *Kerjasama Perpustakaan: Lembaga Pendidikan*, <http://akbarlibrary.blogspot.co.id/2014/12/kerjasama-perpustakaan-lembaga>.

- html, (Jurusan: Ilmu Perpustakaan & Informasi Fakultas: Adab & Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2014), diakses 2015
- Prabowo Tjitropranoto, *Masalah akses informasi*, Jakarta: Pusat Perpustakaan Pertanian dan Biologi, Departemen Pertanian, 1986.
- Purwono, *Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Sholihin, *Konsep Dasar Perpustakaan dan Jaringan Informasi*, Modul. Diambil dari: <http://sholihin.staff.uns.ac.id/kerjasama-perpustakaan/konsep-dasar-perpustakaan-dan-jaringan-informasi/>. Diakses Juni 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Sulistyo-Basuki. Artikel "*Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kerjasama Perpustakaan*" pada: <https://sulistyobasuki.wordpress.Com/2013/04/14/penerapan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-dalam-kerjasama-perpustakaan/#more-191>, diakses tahun 2015.
- Sulistyo-Basuki, *Konsep Pengembangan Perpustakaan Umum Menuju Perpustakaan Digital*, Artikel pdf, <https://sulistiobasuki.wordpress.com> (Jakarta, 2015), di akses 2015.
- Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survey dan Eksperimen*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Tim, *UU No. 43 tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Jakarta: Perpustakaan 2007.
- Tim, *Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi, Dirjen Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Subdit Sarana Prasarana Dan Kemahasiswaan 2012*. Diambil dari: [digilib.uin-suka.ac.id/9820/3/Pedoman%20Pengelolaan%20Perpustakaan % 20 PTAI - Batam.docx](http://digilib.uin-suka.ac.id/9820/3/Pedoman%20Pengelolaan%20Perpustakaan%20PTAI-Batam.docx), (April 2015).
- Tim, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Studi Pendahuluan Dari Fakultas Adab dan Humaniora
- Lampiran II : Surat Izin Studi Pendahuluan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Lampiran III : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran IV : Surat Mohon Izin Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora untuk
Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Lampiran V : Surat Mohon Izin Penelitian dari Fakultas Adab dan Humaniora untuk
Kemenkumham
- Lampiran VI : Surat Izin Penelitian dari Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh
- Lampiran VII : Surat Izin dan Telah melakukan Penelitian dari Kemenkumham
- Lampiran VIII : Surat Sudah Melakukan Penelitian dari Badan Arsip dan Perpustakaan
Aceh
- Lampiran IX : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran X : Dokumen MOU Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh dengan
Kemekumham

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yeni Yunas Afriani
2. Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 02 April 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jeulingke Banda Aceh
6. Email : yeniniehta@yahoo.com

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah
Nama : Nasiruddin
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
2. Ibu
Nama : Zubaidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat : Takengon Aceh Tengah

C. Pendidikan

1. SD : SDN Gegarang Tahun 1996-2002
2. SMP : SMPN Gegarang Tahun 2002-2005
3. SMA : SMAN 5 Takengon Tahun 2005-2008
4. DIII : DIII Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Tahun 2008- 2011
5. S1 : Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Tahun 2016.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juni 2016

Yeni Yunas Afriani,